



Efek Jera untuk Geng Pelajar

■ Raperda Kota Layak Anak Digodok untuk Tekan Kekerasan

Dengan pola pembinaan yang melibatkan kepolisian, bisa jadi anak-anak itu justru akan jera dan tidak coba-coba melakukan aksi kekerasan di jalanan.

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menegaskan bahwa aturan jam malam anak di wilayahnya masih berlaku, bahkan bakal diperketat. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif menyusul insiden pengamanan sejumlah remaja yang kedapatan membawa senjata tajam (sajam) saat asyik nongkrong di wilayah ini.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mendorong aparat kepolisian tidak ragu mengambil tindakan tegas berupa razia dan penggeledahan di tempat-tempat yang kerap menjadi titik kumpul pelajar di malam hari. Pihaknya sudah berkoordinasi dan membangun komitmen kuat dengan Kapolresta Yogyakarta untuk mengintensifkan patroli, khususnya di area-area rawan.

"Saya sudah diskusi sama Pak Kapolres, bahwa kita itu melakukan jam malam ya, sampai jam 22.00. Jadi kalau di atas jam 22.00 itu kita razia saja. Kalau setelah jam 22.00 masih ada anak-anak nongkrong di mana-mana, itu sering berisiko tinggi," ujarnya, tempo hari.

Efek Jera

• Sambungan Hal 1

Sebagai informas, aturan jam malam anak ini mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwali) Yogyakarta No 49 Tahun 2022, yang berlaku setiap hari mulai pukul 22.00 - 04.00 WIB.

Histo menambahkan, tindakan tegas berupa penggeledahan langsung di lokasi menjadi salah satu cara paling efektif untuk memitigasi potensi kejahatan jalanan yang melibatkan anak di bawah umur.

"Kita berkolaborasi bersama Pak Kapolres, kalau ketemu anak-anak muda yang nongkrong sudah di atas jam 22.00, kita geledah saja. Ternyata betul tuh kemarin, ketika kita geledah anak-anak muda yang nongkrong, ternyata bawa senjata tajam. Itu untuk mencegahnya supaya tidak terjadi kejahatan di jalanan," tegasnya.

Ketika dikonfirmasi mengenai status regulasi tersebut, ia memastikan aturan hukum yang mengikat pembatasan aktivitas luar rumah bagi anak-anak ini masih berjalan dan justru diperketat. Ia pun berharap, orang tua disiplin melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya, agar tidak terlibat dalam kenakalan remaja maupun menjadi korban kejahatan jalanan.

"Iya, justru itu. Kami selalu sampaikan dengan Pak Kapolres,ayo kita mitigasi dengan cara razia. Tempat anak-anak atau pelajar nongkrong, pokoknya di atas jam 22.00 kita razia saja," pungkasnya.

Formula pembinaan
Fenomena kenakalan remaja serta keterlibatan anak dalam pusaran tindak kriminal di Kota Yogyakarta, kian memprihatinkan akhir-akhir ini. Guna memutus mata rantai persoalan pelik tersebut, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Layak Anak DPRD Kota Yogyakarta tengah menggodok aturan ketat.

Regulasi teranyar ini nantinya bakal berfokus pada sanksi pencegahan (preventif) serta pembinaan khusus yang melibatkan aparat kepolisian.

Ketua Pansus Raperda Kota Layak Anak DPRD Kota Yogyakarta, Cahyo Wibowo, menuturkan, Regulasi ini dirancang agar memiliki tajid dan memberikan efek jera yang nyata, namun tetap mengedepankan pendekatan edukatif.

Pihaknya pun proaktif menjaring masukan dari Polresta Yogyakarta supaya

pasal-pasal yang disusun nantinya dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. "Kami mengusulkan agar ada sanksi yang lebih bersifat preventif, pencegahan, serta menitikberatkan pada pembinaan atau pendidikan. Berdasarkan diskusi dengan teman-teman Polresta, kami mendapat masukan bagus yang akan kami konsep menjadi frasa pasal dan ayat dalam Raperda ini," ujarnya, usai menggelar audiensi di Mopolresta Yogyakarta, Selasa (26/5).

Cahyo tak menampik, dewasa ini terdapat pergeseran moral di kalangan remaja di Kota Pelajar yang memicu tingginya angka kriminalitas anak. Meroproti masukan dari Korps Bhayangkara, ia menyebut pola asuh dan kontrol sosial yang kian melonggar membuat sebagian anak kehilangan rasa takut, baik kepada orang tua, bahkan Tuhan.

Oleh sebab itu, Pansus menyiapkan formula pembinaan khusus dengan menggandeng pihak kepolisian, yang diharapkan mampu menyentuh psikologis anak secara mendalam. "Dengan pola pembinaan yang melibatkan kepolisian, bisa jadi anak-anak itu justru akan jera dan tidak coba-coba melakukan aksi kekerasan di jalanan," imbuhnya.

Terkait target pengesahan, Cahyo menjelaskan bahwa masa pembahasan Raperda tersebut dijadwalkan berlangsung selama satu tahun. Dokumen hukum ditargetkan rampung dan dipaparkan pada Desember mendatang, di mana sisa waktu yang ada akan dioptimalkan untuk melakukan sinkronisasi dan menajaring masukan dari berbagai stakeholder.

Masukan
Polresta Yogyakarta menyampaikan sejumlah masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Layak Anak di Yogyakarta. Salah satu poin penting yang disampaikan, pihak kepolisian akan melakukan pembinaan di sebuah tempat khusus bagi anak-anak yang terlibat kejahatan jalanan.

Konsep pembinaan semacam ini sesungguhnya sudah dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat (Jabar). Hanya saja dalam studi Raperda di Kota Yogyakarta sekarang ini, pihak kepolisian yang diminta untuk merumuskan pembinaan tersebut.

"Ada masukan kalau dari pak Kapolres mungkin memberikan fasilitas pembinaan. Misalnya mungkin dari pemerintah bermolok

kepada kepolisian untuk dibuat sistem pembinaan baik secara nanti mungkin di lapangan di suatu tempat. Habits itu diberikan materi tentang cinta tanah air, disiplin dan sebagainya," kata Kasatreskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Riski Adrian, saat ditemui.

Dia mengatakan pembinaan itu misalnya para remaja yang terlibat kejahatan jalanan bisa dipantau disebuah camp pelatihan. "Yang penting tadi bahasa halusnya itu pemerintah meminta bantuan kepada kepolisian untuk melakukan pembinaan untuk menanamkan rasa cinta tanah air, disiplin kepada para anak-anak yang berkonflik dengan hukum ini," ujar Adrian.

Seluruh upaya itu menurut Adrian dilakukan guna menekan angka kejahatan jalanan yang dilakukan para pelajar. Dia juga menyoreti perlunya legal standing dalam hal penindakan baik itu dilakukan orang tua maupun pihak sekolah jika mendapati pelajar terlibat kejahatan jalanan.

"Jangan sampai ketika orang tua atau pihak sekolah melakukan tindakan tegas malah berbenturan dengan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) seperti ini mereka bingung bertindak karena itu ada HAM," ujar Adrian.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta, Ipung Purwandari, menilai remaja yang terlibat dalam geng pelajar maupun geng motor sebenarnya berada dalam fase pencarian jati diri. Sehingga selain melalui penindakan, para pelajar juga perlu disilahkan supaya tindakan mereka bisa terukur dan menuju arah yang positif.

"Bagi yang senang berkelahi, sedakan ting tuju. Yang senang kebut-kebutan sedalkan sarana balapan yang resmi. Pemerintah harus hadir di situ untuk mewardah energinya," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan Kota Layak Anak yang aman dari tindak kriminalitas. Dia menekankan bahwa lingkungan yang nyaman bagi anak bukan hanya soal fasilitas fisik, tetapi juga bagaimana mengalihkan energi negatif menjadi prestasi. "Kalau orang tua sudah tidak bisa mengawasi, pembinaan di tempat khusus (kepolisian) seperti ini adalah solusinya. Namun itu butuh ketikhlasan orang tua," tegasnya. (hda/aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005